



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 9549-9562

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Strategi Komunikasi Politik Sukiryanto Dalam Pemenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kalimantan Barat Tahun 2019

Bugiono<sup>1✉</sup>, Netty Herawati<sup>2</sup>, Ema Rahmaniah<sup>3</sup>

Universitas Tanjungpura

Email: [E2091211012@student.untan.ac.id](mailto:E2091211012@student.untan.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Strategi Komunikasi Politik Sukiryanto dalam memenangkan DPD RI Kalimantan Barat pada tahun 2019, di tinjau dengan teori *Strategi Komunikasi politik*. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Data dianalisis dengan mengurangi data, menampilkan data, dan menyimpulkan. Penelitian dilakukan di berbagai lokasi di Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Sambas, Mempawah, Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak, Sekadau, Melawi, Kayong Utara, Kubu Raya, Pontianak, dan Singkawang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Strategi Komunikasi politik* yang digunakan Sukiryanto bisa ditinjau dari teori *Strategi Komunikasi politik* oleh Anwar Arifin dalam Buku Komunikasi Politik (2011) terdapat tiga pendekatan *Strategi Komunikasi Politik* yang biasa digunakan dalam pemilu yaitu *Ketokohan* dan *Kelembagaan*, *Menciptakan Kebersamaan* dan *Membangun Konsensus*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga aspek tersebut merupakan aspek yang paling berkaitan dengan pengenalan figur Sukiryanto kepada masyarakat itu sendiri karena dengan memanfaatkan ketokohan dan kelembagaan Sukiryanto dan tim pemenangan Sukiryanto lebih mudah mendapatkan dukungan karena sudah dikenal lebih dahulu oleh khalayak masyarakat sebelum mencalonkan diri menjadi DPD RI, dengan mudah menciptakan kebersamaan untuk membangun konsensus yang membuahkan hasil berupa dukungan dari masyarakat Kalimantan Barat dan bukan berarti mengabaikan aspek lain tetapi dalam pelaksanaannya memang sangat berpengaruh perolehan suara yang akan didapatkan.

Kata Kunci: *Komunikasi, Politik, Pemilih, Legislatif*.

## Abstract

This research aims to evaluate Sukiryanto's Political Communication Strategy in winning the DPD RI West Kalimantan in 2019, reviewed with the theory of Political Communication Strategy. The method used is descriptive qualitative with data collection through documentation and interviews. Data is analyzed by reducing data, displaying data, and concluding. Research was conducted in various locations in West Kalimantan, including the districts of Sambas, Mempawah, Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak, Sekadau, Melawi, North Kayong, Kubu Raya, Pontianak, and Singkawang. The results of this research show that the political communication strategy used by Sukiryanto can be viewed from the political communication strategy theory by Anwar Arifin in the Political Communication Book (2011). There are three approaches to Political Communication Strategy that are commonly used in elections, namely Characteristics and Institutions, Creating Togetherness and Building Consensus. The results of the research show that these three aspects are the aspects most related to the introduction of Sukiryanto's figure to the community itself because by utilizing Sukiryanto's figure and institutions and Sukiryanto's winning team it is easier to get support because they were already known to the public before running for DPD RI. , easily creates unity to build a consensus that produces results in the form of support from the people of West Kalimantan and this does not mean ignoring other aspects, but in its implementation it really has a big influence on the votes that will be obtained.

Keywords: *Communication, Politics, Voters, Legislature.*

## PENDAHULUAN

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) merupakan respons terhadap tuntutan reformasi di bidang politik. Sebagai upaya untuk mengubah dan mengorganisir lembaga politik, kehadiran DPD RI diharapkan mampu memperkuat peran lembaga legislatif dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Sama dengan implementasi otonomi daerah, penciptaan DPD RI juga diharapkan akan meningkatkan sistem perwakilan daerah yang sudah ada. Meskipun demikian, dalam prakteknya, terdapat kritik dari berbagai pihak terhadap efektivitas lembaga baru ini. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi terhadap keberadaan DPD RI dalam sistem politik Indonesia untuk menilai sejauh mana peran pengawasan dan legislasinya yang efektif.

Keadilan dalam menetapkan kebijakan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa harus dijaga secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, perlu menerapkan keseimbangan melalui lembaga DPD RI, yang akan mewakili kepentingan daerah. Dengan demikian, kita berharap agar pembangunan dapat menjadi lebih merata. DPD RI memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah kepada pemerintah

pusat serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan otonomi daerah di Provinsi. Pengawasan ini dilakukan melalui tiga mekanisme, yaitu mengumpulkan aspirasi dari masyarakat, menyusun laporan dan daftar masalah, serta menyampaikan hasil pengawasan.

DPD RI adalah sebuah bukti nyata keberhasilan reformasi dalam tatanegara Indonesia. Lembaga ini dihadirkan untuk mendukung tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam kapasitas legislatifnya, mencerminkan era baru dalam sistem tatanegara Indonesia. Penguatan peran DPD RI bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara DPR dan DPD, memungkinkan mekanisme check and balances yang efektif. DPD diberi otoritas untuk meninjau kembali RUU yang diajukan oleh DPR atau bahkan berperan aktif dalam mengajukan RUU, serta memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan.

DPD lahir dengan tujuan mencegah disintegrasi, yang sering menjadi masalah di Indonesia sejak era Orde Baru. Fungsinya adalah mewakili suara daerah dalam proses pembangunan. Keberadaannya juga membantu mengurangi dominasi DPR, sehingga DPD menjadi lembaga yang seimbang dan dapat mengurangi potensi korupsi di lingkungan legislatif.

Lahirnya DPD RI merupakan hasil dari sebuah transformasi politik yang kompleks dan berjangka panjang. Tujuan utama dalam pembentukan DPD RI adalah untuk merespons keinginan daerah dan memberikan mereka peran yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan nasional, khususnya terkait dengan masalah daerah. Meskipun telah berdiri sejak tahun 2014, DPD RI masih dihadapi dengan tantangan sebagai sebuah lembaga negara tinggi. Seharusnya DPD RI memegang peran yang signifikan dalam menjalankan prinsip checks and balances antara eksekutif dan legislatif. Salah satu aspek penting dalam revisi UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah pemberian wewenang tambahan kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk mengawasi dan mengevaluasi peraturan daerah (perda) dan rancangan peraturan daerah (raperda).

Dalam ketentuan pasal 249 ayat 1 huruf J UU MD3, disebutkan bahwa DPD memiliki wewenang dan tugas untuk 'mengawasi dan mengevaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah'. Pembentukan DPD merupakan langkah konstitusional untuk memwadahi aspirasi daerah dengan memberikan jalur serta peran kepada entitas daerah. Jalur dan peran ini dibentuk dengan memberi kesempatan bagi daerah-daerah untuk menempatkan perwakilannya dalam badan perwakilan tingkat nasional, yang bertujuan untuk memperjuangkan serta menyuarakan kepentingan daerah mereka, terutama dalam hal

legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat persatuan dalam Negara Republik Indonesia.

DPD RI merupakan manifestasi prinsip representasi wilayah atau regional dari provinsi-provinsi. Seperti halnya DPD RI, undang-undang tingkat daerah ada sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip desentralisasi dalam pemerintahan daerah. Oleh karena itu, hubungan antara DPD RI sebagai wakil wilayah dan peraturan daerah sebagai aturan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan perkembangan daerah yang optimal. Dalam konteks politik, efektifitas dalam berpolitik juga menjadi perlu. Aktivitas politik harus didorong oleh keterlibatan aktif dalam menyampaikan ide, pemikiran, dan upaya terkait isu-isu krusial dalam negara. Seorang politisi tidak hanya berbicara tentang ide, gagasan, dan perjuangan di bidang-bidang penting dalam pemerintahan negara.

Pemilihan secara langsung merupakan momentum besar dalam proses membangun demokrasi di Indonesia. Pada tahun 2019 dilaksanakan pemilihan secara serentak di Indonesia yang salah satunya adalah pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kalimantan Barat tahun 2019 diikuti oleh dua puluh calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yaitu:

Nama - Nama Calon Dewan Perwakilan  
Daerah Republik Indonesia (DPD RI) 2019  
Di Kalimantan Barat

No	Nama	No	Nama
1.	Abdul Fajri	11.	HM Suronto
2.	Abdul Rahmi	12.	Maria Goreti
3.	Amri Kalam	13.	Muhammad Isa
4.	Beni Sulastiyo	14.	Muhammad Saleh
5.	Cristiandy Sanjaya	15.	Mujilastuti
6.	Erlinawati	16.	Nch Saivan
7.	Glorio Sanen	17.	Rubaeti Elita
8.	Ikke Wicaksono	18.	Prof Samion,
9.	Josep Odillo Oendoen	19.	Sukiryanto
10.	Khalilah,	20.	Yudi Aldiansyah

*Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU Provinsi) 2019*

Dari dua puluh calon siapa sangka ada nama Sukiryanto berada dari salah satu 20 nama calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang hanya Sarjana S1 Agama Islam. Selain itu, ia baru pertama kali ikut pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sukiryanto yang awalnya tidak sama sekali ingin calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tetapi dorongan dari beberapa Tokoh Madura yang berada di Kalimantan Barat Padahal sudah ada 2 calon yang bersuku Madura Yaitu: Muhammad Saleh dan Khalilah tetapi Tokoh Madura tetap bersikeras mendorong Sukiryanto untuk maju karena potensi Sukiryanto yang hampir seluruh masyarakat khususnya Madura di Kalimantan Barat mengenal Sukiryanto, dengan dorongan dari Tokoh Madura Kalimantan Barat agar Sukiryanto menandatangani diri untuk mencalonkan diri menjadi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), maka Sukiryanto dan Beberapa Tokoh Madura membentuk tim pemenangan Sukiryanto pada pemilihan Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Pada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Kalimantan Barat tahun 2019 terdapat 20 calon. Sukiryanto beserta Tim Pemenangan benar-benar mengatur strategi untuk memenangkan dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Kalimantan Barat dengan cara membangun basis-basis khususnya Suku Madura karena tim pemenangan juga memanfaatkan pengurus-pengurus Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM) Kalimantan Barat, Sukiryanto yang saat itu juga menjadi Ketua Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM) Kalimantan Barat, dan pada saat itu pengurus Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM) Kalimantan Barat sudah ada sepuluh cabang di 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Yaitu: pengurus cabang IKBM Kota Pontianak, pengurus cabang IKBM Kota Singkawang, pengurus cabang IKBM Kabupaten Mempawah, pengurus cabang IKBM Kabupaten Kubu Raya, pengurus cabang IKBM Kabupaten Ketapang, pengurus cabang IKBM Kabupaten Kayong, pengurus cabang IKBM Kabupaten Bengkayang, pengurus cabang IKBM Kabupaten Sintang, pengurus cabang IKBM Kabupaten Sekadau, dan pengurus cabang IKBM Kabupaten Sanggau. Walaupun 10 pengurus Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM) Kabupaten/Kota Tim Pemenangan Sukiryanto juga turun di 4 Kabupaten untuk mendapatkan suara Pemilih yaitu Kabupaten Melawi, Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, dan Kapuas Hulu dengan mengatur strategi politik karena Sukiryanto juga banyak Rekan Bisnis baik itu Properti ataupun yang lainnya untuk kemenangan Sukiryanto pada pemilihan Dewan perwakilan daerah Republik Indonesia (DPD RI) Kalimantan Barat.

Tim Pemenangan Sukiryanto memiliki tujuan meraih dukungan sebanyak 350.000 suara pada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Kalimantan

Barat. Oleh karena itu, Sukiryanto dan timnya harus bekerja keras untuk mencapai target tersebut dalam pemilihan tersebut. Melalui latar belakang ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang mengungkap strategi komunikasi politik yang digunakan oleh tim pemenang Sukiryanto untuk memenangkan pemilihan DPD RI Kalimantan Barat tahun 2019.

Berdasarkan data hasil Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Kalimantan Barat tahun 2019 di Lampiran 1, menunjukkan jumlah suara Sukiryanto Tahun 2019 dengan urutan keempat dari (20) kandidat diantaranya: (1). Drs. Cristiandy Sanjaya, S.E., M.M. dengan perolehan suara 406.304. (2). Maria Goreti, S.Sos., M.Si. dengan perolehan suara 287.341. (3). Erlinawati, S.H., M.AP. dengan perolehan suara 259.058. dan di Urutan ke (4). H. Sukiryanto dengan perolehan suara 220.937. Meskipun dalam kontestasi politik ini Sukiryanto tidak mencapai target yang awalnya Tim Pemenangan Sukiryanto menargetkan 350.000 suara tetapi hanya mendapatkan 220.937 suara, beruntungnya Sukiryanto tetap masuk di urutan keempat menduduki kursi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)

Walaupun tidak memuaskan akhirnya kerja keras Tim Pemenangan Sukiryanto membuahkan hasil karena Sukiryanto menempati urutan ke 4 yang di lakukan Tim Pemenangan Sukiryanto adalah dengan cara merangkul masyarakat dengan ketokohan Sukiryanto khususnya dikalangan masyarakat yang bersuku Madura dengan memanfaatkan yang saat itu Sukiryanto menjadi ketua Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM) Kalimantan Barat. Jadi hampir seluruh masyarakat Kalimantan Barat yang bersuku madura mengenal Sukiryanto terutama di 10 Kabupaten/Kota yang terbentuk pengurus cabang Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM), Tim Pemenangan Sukiryanto dan organisasi Ikatan Keluarga besar Maduara (IKBM) juga sering melakukan kegiatan yang menimbulkan rasa kebersamaan antara Sukiryanto dengan Masyarakat Kalimantan Barat.

## METODE PENELITIAN

Salah satu metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, menggunakan teknik *purposive*. Sugiyono (2011:118-127) menjelaskan bahwa teknik *purposive* melibatkan pemilihan sampel dengan pertimbangan khusus, seperti memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan yang tepat dan akurat. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah:

1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kalimantan Barat.
2. Ketua Tim Sukses Pemenangan Sukiryanto Dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kalimantan Barat.

3. Anggota Tim Sukses Pemenangan Sukiryanto Dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kalimantan Barat.
4. Tokoh Masyarakat di Kalimantan Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Ketokohan dan Kelembagaan

Strategi ketokohan dan memantapkan kelembagaan memiliki arti bahwa ketokohan seorang politikus beserta kemantapan lembaga politiknya dalam kehidupan masyarakat memiliki pengaruh terhadap strategi komunikasi politik. Ketokohan adalah sifat yang dimiliki oleh individu yang memadukan kredibilitas, kepercayaan (*al amin*), daya tarik, dan kekuasaan. Kredibilitas, pada dasarnya, mencerminkan bagaimana publik memandang sifat-sifat seorang komunikator. Faktor-faktor ini dapat dianggap sebagai unsur-unsur penting dalam kredibilitas, yaitu keahlian dan tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh komunikator dalam pandangan masyarakat. Keahlian mencerminkan kemampuan yang diakui oleh masyarakat, sementara kepercayaan (*al amin*) adalah gambaran moralitas komunikator yang tercermin dalam persepsi komunikan atau penonton, terutama dalam konteks politikus, aktivis, atau profesional (Arifin, 2011).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Memantapkan Kelembagaan dalam mencari dukungan tidak serta merta mengandalkan kelembagaan dalam mencari dukungan tapi lebih mempromosikan diri pribadi dengan cara bertamu kerumah beberapa tokoh yang berpengaruh di masyarakat khususnya Kalimantan Barat untuk mencari dukungan, dengan lebih representatif baik secara kualitas maupun kuantitas terlebih lagi mempunyai sifat loyalitas yang tinggi, kecakapan, kedewasaan dan kesederhanaan dalam kehidupan dan kelembagaan dalam mencari dukungan daerah khususnya Kalimantan Barat kalbar untuk memenangkan kepentingan pada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) 2019 Kalimantan Barat.

Hal ini dikarenakan adanya ketokohan dan kelembagaan yang berpengaruh terhadap masyarakat banyak. Dalam strategi politik ini dapat menekan biaya karena sudah memegang tokoh atau lembaga masyarakat, koordinasi lebih mudah dan terkendali antara calon legislative dan tim pemenangan dengan tokoh dan lembaga masyarakat.

Secara teoritis ketokohan dan kelembagaan ini Penyampaian pesan politik secara langsung kepada para tokoh masyarakat dan kelompok yang berbeda etnis. Dengan mengomunikasikan tujuan dan rencana dari calon kandidat dalam sebuah pemilihan umum dan melibatkan tim kampanye untuk mendukung calon tersebut. Strategi ini melibatkan pertemuan langsung antara calon, tokoh masyarakat, pemimpin organisasi, dan lembaga

yang memiliki pengaruh dalam masyarakat, dengan tujuan memanfaatkan kekharisman dan dukungan lembaga-lembaga tersebut dalam proses kampanye politik.

Secara empiris ketokohan dan kelembagaan merupakan langkah untuk mensosialisasikan melalui kegiatan tatap muka seperti berdialog dua arah yang bertujuan kandidat dan konsituen dapat mengenal secara dekat. Hal tersebut dapat memberikan dampak yang baik mengenai opini masyarakat agar kandidat mengetahui keluh kesah masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga kandidat menjadi solusi atas persoalan dan mendapatkan simpati saat melakukan sosialisasi.

Ketokohan dan kelembagaan yang berpengaruh terhadap masyarakat banyak. Dalam strategi politik ini dapat menekan biaya karena sudah memegang tokoh atau lembaga masyarakat, koordinasi lebih mudah dan terkendali antara calon legislative dan tim pemenangan dengan tokoh dan lembaga masyarakat. Maka dengan merawat ketokohan dan terus memantapkan kelembagaan bisa menjadi efek yang diraih pun semakin besar dalam mempengaruhi masyarakat. Tokoh dan kelembagaan yang dipilih juga harus bias menjadi pusat perhatian misalnya tokoh dan kelembagaan yang mewakili khalayak luas, seperti: tokoh politik, tokoh masyarakat, kelompok-kelompok yang berpengaruh di masyarakat.

## B. Menciptakan Kebersamaan

Menciptakan kebersamaan merupakan bagian integral dari strategi komunikasi politik yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan komunikasi politik tersebut. Menciptakan kesatuan bisa ditempuh dengan cara mengenal politisi dengan masyarakat dan menyusun pesan yang serupa. Dalam konteks kesamaan ini, perlu ada keselarasan bahasa (simbol komunikasi), pakaian, serta kepentingan politik dengan masyarakat, terutama terkait dengan pesan politik, metode, dan media politik. Homifili atau empati adalah aspek penting dalam upaya membangun dan menjaga reputasi seseorang yang berperan sebagai politikus, aktivis, atau profesional dalam peran komunikator. Beberapa elemen yang harus dipertimbangkan dalam membentuk hubungan yang solid mencakup pemahaman terhadap audiens, perencanaan pesan persuasif, penentuan strategi, serta seleksi dan penggunaan media yang tepat (Arifin, 2011).

Hubungan antara partai politik atau seorang kandidat dengan masyarakat adalah sebuah keterlibatan literasi, di mana keduanya terlibat dalam upaya bersama untuk membangun pemahaman yang saling berarti. Ini penting untuk dilakukan karena partai politik, kandidat, dan masyarakat memiliki sudut pandang yang berbeda (Khoiron & Siboy, 2018). Mengenai hubungan ini, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa komunikasi

politik bisa terwujud melalui beberapa cara, seperti berinteraksi secara langsung atau mengadakan pertemuan, membentuk kelompok relawan atau komunitas, serta menjaga hubungan baik dengan semua pihak yang terkait (Jeffri, 2021).

### C. Membangun Konsensus

Penting untuk memiliki konsensus dalam strategi komunikasi politik, yang biasanya diperoleh setelah adanya perbedaan pendapat atau konflik. Dalam rangka mencapai kesepakatan ini, politikus, aktivis, atau profesional harus memiliki keterampilan untuk berkompromi dan bersikap terbuka (Arifin, 2011). Menurut Hyang, proses perundingan melibatkan beberapa individu yang memiliki nilai tambah dalam mencapai kesepakatan sesuai dengan tujuan, dapat dianggap sebagai esensi dari negosiasi (Hyang, 2018).

Dewey berpendapat bahwa dialog antara anggota masyarakat adalah aspek kunci dalam mengubah pengetahuan khusus yang dimiliki para ahli menjadi pengetahuan yang dapat diterapkan dalam praktik, sehingga menghasilkan pengetahuan dan solusi untuk konflik sebagai hasil dari interaksi sosial (Semetko & Scammell, 2016). Dahrendorf berpendapat bahwa konflik adalah hal yang tak terhindarkan dalam kehidupan sosial. Dia juga menyatakan bahwa konflik tidak akan terjadi di masyarakat tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Selain itu, dalam kelompok, konflik tidak akan muncul jika anggotanya tidak memiliki hubungan atau pengalaman bersama. Lebih jauh, konflik dapat berperan dalam menciptakan hubungan harmonis atau kesepakatan di antara individu atau kelompok (Ikrom, 2011).

Salah satu langkah strategis ketiga yang perlu diambil dalam upaya mencapai tujuan komunikasi politik adalah menciptakan kesepakatan di antara politisi dari berbagai partai. Ini biasanya terjadi selama pertemuan, konferensi, dan dalam proses lobbying, dengan menerapkan pendekatan komunikasi interaktif sesuai dengan perspektif interaksional.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui dengan Merawat Konsensus agar terus meluangkan waktu pada kegiatan-kegiatan yang berbentuk sosial dan juga Sukiryanto terus membuka diri untuk berdiskusi dengan masyarakat menunjukkan komitmen (kesungguhan) dan menunjukkan kedermawanan serta kebijaksanaan. Membuat komitmen bersama atas apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama (konsensus) antara Sukiryanto dan tim pemenangan Sukiryanto serta tokoh yang berpengaruh di masyarakat jika kesepakatan ini terus terawat maka kesempatan melobi masyarakat pun akan lebih mudah dan untuk mendapatkan dukungan juga kesepakatan bersama ini bisa menjadi dasar untuk mendapatkan dukungan dari mereka serta memungkinkan meminta mereka untuk membantu mengkampanyekan ke masyarakat Kalimantan Barat agar memilih Sukiryanto,

tanpa disadari membuat tokoh masyarakat tersebut memiliki emosional yang membuat merasa turut andil dan memiliki perjuangan politik yang tujuannya sama sebagai alat perjuangan bersama untuk mendapatkan dukungan.

Menghadapi tantangan dalam membangun konsensus melalui strategi komunikasi politik melibatkan pendekatan hubungan politik dengan individu-individu atau kelompok tertentu. Keberhasilan dalam mengumpulkan dukungan massa sangat bergantung pada pemilihan tokoh yang terlibat dalam proses ini. Semakin tepat pemilihan tokohnya, dampak yang dihasilkan akan semakin signifikan dalam memengaruhi opini publik. Tokoh-tokoh yang menjadi fokus harus mewakili beragam segmen masyarakat, seperti politisi, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial. Membangun konsensus politik sendiri sedikit lebih kompleks daripada kedua pendekatan diatas. Hal ini dikarenakan adanya tokoh-tokoh atau kelompok masyarakat yang mempunyai pengaruh terhadap pemilih dengan membangun kesepakatan bersama (konsensus) antara calon dengan tokoh-tokoh dan kelompok tersebut agar menjadi dukungan.

Tantangan dari membangun konsensus dalam pendekatan ini perlu dilakukan secara tatap muka antara calon dan tim pemenang dengan tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga yang berpengaruh di masyarakat duduk bersama dan melakukan diskusi untuk mendapatkan kesepakatan bersama (konsensus), tetapi tidak semua tokoh dan kelompok masyarakat mempunyai sikap kedewasaan dan kesadaran politik untuk menerima visi misi yang sudah dibuat.

Pesan-pesan politik bisa disampaikan dengan berbagai cara, baik secara halus maupun terang-terangan, dengan tujuan untuk memengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu. Ada juga pengaruh pasif, di mana individu atau kelompok tidak secara aktif memengaruhi pemilih, tetapi menjadi panutan bagi mereka. Tokoh dan kelompok ini menjadi contoh atau teladan dalam masyarakat, dan suara serta tindakan mereka memiliki dampak politik pada pendukung mereka. Pengikut mereka bervariasi dalam kategori seperti anggota, pendukung, dan penggemar, dan mereka memiliki hubungan yang erat baik secara fisik maupun emosional dengan pemberi pengaruh tersebut.

Secara konseptual, upaya untuk mencapai konsensus politik melibatkan pembentukan hubungan politik dengan para pemimpin masyarakat, pemuda, dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks ini, calon atau tim kampanye dapat membuat perjanjian atau kesepakatan politik dengan para pemimpin tersebut sebagai ikatan yang kuat. Ini memungkinkan para pemimpin tersebut untuk meminta pemenuhan janji-janji politik yang tercantum dalam perjanjian saat calon yang mereka dukung meraih kemenangan, dengan

tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tempat para pemimpin tersebut berasal.

Secara praktis, mencapai kesepakatan atau kesepakatan bersama dengan tokoh, kelompok, atau organisasi yang memiliki kekuatan pengaruh. Dalam konteks penyampaian pesan politik, pendekatan pemasaran ini melibatkan individu, kelompok, atau entitas yang memiliki dampak signifikan. Pelaksanaan strategi ini harus dilakukan dengan hati-hati, karena kesalahan dalam prosesnya dapat memiliki konsekuensi serius, seperti penolakan pesan politik yang diusulkan. Penyampaian pesan politik kali ini sangat penting agar diterima di tokoh yang berpengaruh pada masyarakat karena merupakan tujuan yang harus dicapai baik untuk tim kampanye maupun Sukiryanto.

Menggunakan Strategi Komunikasi Politik untuk Membangun Konsensus melibatkan upaya menjalin hubungan politik dengan individu dan organisasi yang memiliki pengaruh signifikan di masyarakat Kalimantan Barat. Keberhasilan dalam mengumpulkan dukungan massa sangat tergantung pada seleksi tokoh yang berperan dalam proses ini. Semakin tepat pemilihan tokoh tersebut, semakin besar dampaknya dalam memengaruhi masyarakat. Tokoh-tokoh yang menjadi fokus perhatian dalam konteks ini haruslah tokoh yang dapat mewakili beragam segmen masyarakat, seperti tokoh politik, tokoh masyarakat, dan berbagai lembaga masyarakat. Membangun konsensus. Hal ini dikarenakan adanya tokoh-tokoh atau kelompok masyarakat yang mempunyai pengaruh terhadap pemilih dengan membangun kesepakatan bersama (konsensus) antara calon dengan tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok yang berpengaruh di masyarakat tersebut agar menjadi dukungan.

Pendekatan ini bisa saja dilakukan secara tatap muka antara calon dan tim pemenangan dengan tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga yang berpengaruh di masyarakat duduk bersama dan melakukan diskusi untuk mendapatkan kesepakatan bersama (konsensus), jika kesepakatan visi misi bersama tersebut sudah disepakati oleh calon dan tim pemenangan dengan tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga yang berpengaruh di masyarakat tersebut maka akan lebih mudah untuk mendapatkan dukungan yang lebih aman dan lebih jelas dukungan dari mereka karena suatu komitmen antara calon dan tokoh yang berpengaruh di masyarakat juga membantu mengkampanyekan calon ke masyarakat secara terang-terangan.

Secara praktis, mencapai kesepakatan atau persetujuan bersama tokoh, kelompok, atau organisasi yang memiliki pengaruh adalah metode yang digunakan dalam strategi pemasaran pesan politik. Dalam konteks ini, pesan politik disampaikan melalui individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kekuatan pengaruh. Strategi ini berkeuntungan dalam melakukannya karena penyampaian pesan politik kali ini sangat penting agar

diterima di tokoh yang berpengaruh pada masyarakat karena merupakan tujuan yang harus dicapai baik untuk tim kampanye maupun Sukiryanto.

Teori ketiga dominan dalam pemenangan sukiryanto pada pemilihan dewan perwakilan daerah republik indonesia (DPD RI) di kalimantan barat adalah Membangun Konsensus yang dilakukan Sukiryanto untuk mendulang suara dalam pemilu legislatif tahun 2019 di dapil Kalimantan Barat. Dengan membangun kesepakatan bersama para tokoh atau kelompok masyarakat ini kandidat dan tim memiliki kemudahan untuk melakukan sosialisasi, karena sebuah kelompok memiliki jejaring yang luas dan tokoh dan kelompok masyarakat yang tergabung memiliki bidang yang difokuskan. Seperti tokoh Agama, tokoh masyarakat atau kelompok kepemudaan yang mengakomodir anak muda setempat, kelompok berbagai etnis misalnya (Paguyuban). Bisa menjadi dongkrakan dukungan untuk Sukiryanto sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah Kalimantan Barat Republik Indonesia (DPD RI) tahun 2019.

#### SIMPULAN

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Sukiryanto mengadopsi beberapa strategi komunikasi politik dalam rangka memenangkan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kalimantan Barat tahun 2019. Strategi-strategi ini melibatkan merawat ketokohan, mengokohkan struktur kelembagaan, membangun kedekatan dengan masyarakat, serta menciptakan kesepakatan bersama. Rincian dari strategi komunikasi politik tersebut adalah sebagai berikut.

Strategi komunikasi dalam membangun ketokohan dilakukan dengan merangkul berbagai kalangan melalui pendekatan suku dan budaya, pendekatan budaya melalui keaktifannya dalam kegiatan-kegiatan sosial dan menghadiri yang berhubungan dengan masyarakat, serta pembentukan identitas diri sebagai putra daerah Madura Kalimantan Barat yaitu mengenakan "*Odheng*" yaitu penutup kepala adat Madura. Hal ini didukung oleh kredibilitas dan kemampuan dalam memahami persoalan utama yang dihadapi masyarakat serta adanya peran tim pemenangan yang efektif mendapat dukungan dari masyarakat Kalimantan Barat. Sedangkan strategi komunikasi politik terkait kelembagaan dibuktikan oleh *brand* politik yang penuh kepedulian, kejujuran serta bersih dalam menunjang program yang diberikan kepada masyarakat Kalimantan Barat.

Strategi komunikasi politik dalam membangun kebersamaan dilakukan dengan menciptakan suasana homofili dengan masyarakat yaitu dengan memahami khalayak, menyusun pesan persuasif, menetapkan metode dan memilih media yang efisien. Selain itu, untuk menarik perhatian dan menampung aspirasi masyarakat disampaikan secara

*redundancy* atau *repetition* (berulang) agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan keinginan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media cetak yang beragam seperti pamphlet dan brosur (selebaran).

Dalam usaha mencapai kesepakatan mengenai strategi komunikasi untuk meraih kemenangan dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Kalimantan Barat tahun 2019, Sukiryanto bersama tim pemenangan yang telah dibentuk dan dipimpinnya melakukan berbagai lobi politik dengan tujuan untuk mengakomodir serta menyatukan persepsi sekaligus menyusun visi misi yang sesuai dengan kepentingan masyarakat mulai dari politisi, birokrasi, hingga tokoh masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar, (2011). Komunikasi Politik (*Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*), Buku Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ahmad, Junaidi, dkk, 2018, "*Media dan Komunikasi Politik (Potret Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Komunikasi Politik*", Mbrige Press, D.I. Yogyakarta.
- Anshori, Akhyar, dkk, 2019, "*Komunikasi Politik di Indonesia*", Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta.
- Bonnes, C., Schmidt-Hertha, B., Rott, K. J., & Hochholdinger, S. (2020). *The Relationship Between Trainers' media-didactical competence and media-didactical self-efficacy, attitudes and use of digital media in training* international journal of training and Developmen.
- Chester, J., & Montgomery, K. C. (2019). *The digital Commercialisation of us politics 2020 and beyond*. Internet policy review.
- Cangara Hafied. (2016) Komunikasi Politik, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Ekowati, E. Y. (2019). *The Effectiveness of social Media as a Tool for Regional Election Campaign* in Indonesia.
- Hepp, A. (2020). *Artificial Companions, Social bots and work bots: communicative robots as research objects of media and communication studies*. Media, Culture and Society.
- Harrison, Lisa. 2009 *Metodelogi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana
- Kariryaa, A., Runde, S., Heuer, H., jungherr, A., & Schoning, J. (2020). *The Role of Flag Emoji in Online Political Communication*. Social Science Computer Review.
- Kaul, V. (2020). *The Digital Communications Revolution*. Online Journal of Communication and Media Technologies.
- Littlejohn, Stephen W., 1994. *Theories Of human Communication (Six Edition)*, Sage Publication, London.

- McQuail, Dennis, 1992, "Political Communication" dalam Maurice Kogan (ed), *Encyclopedia of Government and Politics Vol. 1*. London: Routledge.
- Mulyana, Deddy, 2012, "Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar", PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moleong, L.J. 2007 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit: PT Remaja Rosda Karya.
- Nimmo, Dan, 2005, *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan, 2007, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, Cetakan Kedua, termahan Tjun Surjaman, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Philippe J. Maarek, P., & Maarek, P. (2014). *Politics 2.0: New Forms of Digital Political Marketing and Political Communication*. Tripodos.
- Rahyadi, I., & Aras, M. (2020) *Donald digital marketing: An exploratory study of digital political marketing in trump presidential campaign*. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*.
- Soderholm, P., Hellsmark, H., Frishammar, J., Hansson, J., Mossberg, J., & Sandstrom, A. (2019). *Technological Development for sustainability: The role of network management in the innovation policy mix*. *Technological Forecasting and social Change*.
- Suhardjo, I., Hidayat, D. R., Sinaga, O., & Heryanto, G. G. (2019). *The Failure of Communication between elite in political organization*. *Opcion*.
- Supriyanto, Y. (2011). *Peran Komunikasi Politik Pemerintah Dalam Mencegah Disintegritas Bangsa*. *Jurnal kybernan*.
- Suyanto, S. (2016). *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia*. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*.
- Sugiyono, 2015 *Memahami Penelitian Kualitatif Bandung*. CV. Alfabeta.
- Yudhatama, Iranda, 2017., *Komunikasi Politik dan Partisipasi Warga dalam Arena Perencanaan dan Penganggaran Dana Keistimewaan DIY*, *Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 15 Nomor 3  
<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/2172>